SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK

Perang Padri & Identitas Minangkabau

Kajian Sosiologis · Historiografis · Filosofis

I · Interpretasi Sosiologis Imam Bonjol

II · Unsur Struktural & Stratifikasi Kelas

III · Perebutan Tafsir Identitas

IV · Bias Sosiologis — Catatan Pinggir Historiografi

V · Konsolidasi Filosofis & Falsafah ABS-SBK

VI · Sintesa Inferentif & Konklusi

Minangkabau 1803 – 1838 · Awal Abad ke-19

DAFTAR ISI

Vol. I

Interpretasi Sosiologis Imam Bonjol dalam Perang Padri

Hirarkis & Struktur Sosial · Dogmatik & Diplomasi Pihak Asing

Vol. II

Unsur Struktural Perang Padri & Hierarki Sosial

Motif Konflik · Stratifikasi Kelas · Kapitalisasi Kekuasaan

Vol. III

Perebutan Tafsir Identitas dalam Medan Sosiologis

Tradisi & Adat vs Keyakinan Beragama · Clausa menuju Causa

Vol. IV

Bias Sosiologis — Sebuah Catatan Pinggir Historiografi

Audit Sumber · Angka 139 · Petisi Pahlawan · Plakat Panjang

Vol. V

Konsolidasi Filosofis Adat dan Ulama

Falsafah ABS-SBK · Nilai Bersama · Maqashid & Adat

Vol. VI

Pasca Perang Padri — Sintesa Inferentif & Konklusi

Norma Fundamental · Supremasi Sosial · Arah Sosio-Politik

Vol. ☒

Puisi: Padri yang Kemarin — Sudahkah Membaca Siapa

Catatan Poetik Penutup

SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK PERANG PADRI

VOL. I

Interpretasi Sosiologis Imam Bonjol dalam Perang Padri

Hirarkis dan Struktur Sosial dalam Relasi Dogmatik dan Diplomasi Pihak Asing: Antara Tradisi dan Reformasi Epistemologi Islam

□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

Al-Anbiya: 107 — "Dan Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam"

I MUKADIMAH

Konflik sebagai Teks Sosial

Perang Padri (1803–1838) bukan sekadar peristiwa militer di Sumatera Barat. Ia adalah *teks sosial* yang kompleks — sebuah momen di mana tiga kekuatan besar bertemu dalam ketegangan struktural yang mendalam: reforma Islam Wahhabiyah yang baru bersemi dari tanah Hijaz, tatanan adat Minangkabau yang telah mengakar selama berabad-abad dalam sistem matrilineal, dan imperialisme kolonial Belanda yang menghitung setiap celah konflik sebagai peluang ekspansi.

Tuanku Imam Bonjol — nama aslinya Muhammad Syahab, lahir sekitar 1772 di Bonjol, Pasaman — bukan hanya panglima perang. Ia adalah simpul epistemologis: seorang ulama yang harus mengelola ketegangan antara kesalehan reformis dan keharusan koalisi, antara otoritas keagamaan dan imperatif politik, antara doktrin yang murni dan diplomasi yang kotor.

Kajian ini mengajukan pembacaan sosiologis atas figur Imam Bonjol dengan berfokus pada tiga lapis analisis: (1) struktur hierarki sosial dan otoritas keagamaan dalam masyarakat Minangkabau; (2) relasi dogmatik antara gerakan Padri dan tradisi epistemologi Islam yang lebih luas; dan (3) dinamika diplomasi dengan pihak asing — khususnya Belanda — yang mengubah karakter konflik ini dari perang saudara menjadi perang antikolonial.

> *"Imam Bonjol adalah paradoks hidup: seorang reformis yang terpaksa menjadi negosiator, seorang ahli fiqh yang harus menjadi ahli strategi militer, dan seorang musuh Belanda yang pernah menandatangani perjanjian dengan mereka."*
>
> — Tamar Djaja, Riwajat Hidup Tuanku Imam Bonjol (1951)

II HIERARKI

Hierarki dan Struktur Sosial Minangkabau

A. Sistem Matrilineal dan Otoritas Adat

Masyarakat Minangkabau diorganisasi di atas prinsip matrilineal — nasab dan warisan dari garis ibu — yang merupakan salah satu sistem sosial paling konsisten di dunia Islam. Sistem ini menghasilkan hierarki yang unik: *penghulu* (pemimpin suku) memegang otoritas adat, sementara perempuan menjadi

poros keberlangsungan garis keturunan dan kepemilikan harta pusaka. *Nagari* — unit politik terkecil — diperintah oleh musyawarah penghulu yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari.

Struktur ini menciptakan dualisme otoritas yang sudah ada jauh sebelum Perang Padri: otoritas adat (penghulu) berdampingan — dan kerap bersaingan — dengan otoritas keagamaan (ulama). Ketegangan di antara keduanya adalah bahan bakar struktural yang menjadi sumbu Perang Padri.

B. Harimau Nan Salapan: Arsitektur Kepemimpinan Padri

Gerakan Padri tidak muncul dari satu figur tunggal, melainkan dari sebuah dewan ulama yang dikenal sebagai *Harimau Nan Salapan* (Delapan Harimau). Di antara anggotanya yang paling berpengaruh adalah Tuanku Nan Renceh dari Kamang — yang dikenal keras dan tidak kenal kompromi — serta pada fase selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Tambusai.

Struktur Harimau Nan Salapan mencerminkan model kepemimpinan kolektif yang berakar pada tradisi syura dalam Islam, namun ia juga reproduksi dari pola kepemimpinan nagari yang telah ada. Ini adalah contoh bagaimana reformisme Islam tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan menyerap dan mentransformasi struktur sosial yang sudah ada.

C. Posisi Imam Bonjol dalam Hierarki Padri

Keistimewaan Imam Bonjol terletak pada kapasitas *mediasi*-nya. Berbeda dengan Tuanku Nan Renceh yang cenderung memaksakan agenda reformis secara total, Imam Bonjol menunjukkan fleksibilitas taktis yang lebih besar — suatu kualitas yang dalam sosiologi Weber dapat diklasifikasikan sebagai kombinasi antara *otoritas karismatik* (kewibawaan keagamaan personal) dan *otoritas tradisional* (legitimasi yang diakui dalam hierarki ulama yang ada).

III EPISTEMOLOGI

Relasi Dogmatik: Epistemologi Islam antara Wahhabiyah dan Tradisi Lokal

Tiga ulama yang kembali dari Mekkah sekitar 1803 — Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang — membawa bukan hanya pengetahuan fiqh baru, tetapi juga paradigma epistemologis yang berbeda. Ajaran Wahhabiyah Muhammad ibn Abd al-Wahhab menawarkan model pembersihan radikal: kembali kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai satu-satunya sumber otoritatif, menolak taklid buta kepada mazhab, dan mengkritisi segala bentuk praktik yang dianggap bid'ah atau syirik.

Pertanyaan mendasar yang melatari ketegangan epistemologis dalam Perang Padri adalah: sejauh mana ijtihad diperbolehkan dalam konteks adat dan muamalat lokal? Para ulama Padri mendorong aplikasi teks-teks primer secara langsung. Kaum Adat bersandar pada argumen *'urf* (kebiasaan yang diakui dalam fiqh) sebagai justifikasi praktik mereka.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

Al-'adah muhakkamah — "Adat adalah hakim" (Kaidah Fiqh)

Hasil akhir dari pergulatan epistemologis ini adalah rumusan yang kini menjadi fondasi identitas Minangkabau: *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Ia adalah formula kompromi ontologis yang menempatkan keduanya dalam hierarki vertikal yang saling menopang.

IV DIPLOMASI

Diplomasi Pihak Asing: Belanda sebagai Variabel Pengubah

Pada tahun 1821, dalam posisi yang terdesak oleh serangan Padri, para pemimpin adat Minangkabau membuat keputusan yang akan mengubah seluruh karakter konflik ini: mereka meminta bantuan militer Belanda. Tindakan ini adalah contoh tekstual dari apa yang dalam teori hubungan internasional disebut sebagai *balancing* — pihak yang lebih lemah mengundang kekuatan eksternal untuk menyeimbangkan kekuatan saingannya.

Titik balik yang paling dramatis terjadi pada 1833, ketika Kaum Padri dan Kaum Adat bersatu dalam perlawanan terhadap Belanda. Persatuan 1833 mencerminkan sebuah pergeseran identitas yang mendasar: dari konflik internal berbasis perbedaan epistemologi-agama menuju solidaritas berbasis ancaman eksistensial eksternal. Imam Bonjol, sebagai figur yang telah menunjukkan kapasitas diplomasi sebelumnya, menjadi simbol persatuan ini.

Jatuhnya Benteng Bonjol pada Agustus 1837 dan penangkapan Imam Bonjol bukan hanya kekalahan militer. Ia adalah momen di mana struktur perlawanan yang dibangun di atas otoritas personal-karismatik berhadapan dengan kekuatan institusional-birokratis yang jauh lebih besar. Imam Bonjol diasingkan ke Cianjur, kemudian Ambon, dan akhirnya meninggal dalam pengasingan di Manado pada tahun 1864.

> *"Imam Bonjol adalah seorang yang kalah dalam sejarah tetapi menang dalam memori — dan memori kolektif, dalam sosiologi Durkheim, adalah sumber kohesi sosial yang paling tahan lama."*
>
> — Tafsir penulis atas Emile Durkheim

SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK PERANG PADRI

VOL. II

Unsur Struktural Perang Padri & Hierarki Sosial

Motif Konflik dan Ketimpangan Sosiologis: Pertikaian dan Stratifikasi Kelas Sosial dalam Indikator Kategori Dua Kelompok Sosial Ulama dan Kelompok Adat dalam Kapitalisasi Kekuasaan

I KERANGKA

Konflik Sosial sebagai Cermin Struktur

Perang Padri bukan semata-mata konflik teologis antara reformisme Islam dan tradisi adat. Pada lapisan yang lebih dalam, ia adalah pertarungan struktural atas siapa yang berhak mendefinisikan tatanan sosial, mengelola sumber daya simbolik maupun material, dan menduduki puncak hierarki legitimasi dalam masyarakat Minangkabau. Dengan kata lain, Perang Padri adalah konflik kelas dalam jubah agama.

Karl Marx menekankan bahwa ideologi — termasuk agama — kerap berfungsi sebagai superstruktur yang menyamarkan pertarungan material di lapisan bawahnya. Sementara Max Weber menambahkan dimensi *status dan prestise* sebagai sumber konflik yang sama legitim-nya dengan kepemilikan ekonomi. Pierre Bourdieu memberikan alat konseptual yang paling tajam: konsep *field* (medan sosial) dan *capital* (kapital).

PROPOSISI ANALITIS KUNCI

Perang Padri adalah konflik distribusi kapital yang disajikan dalam bahasa teologi. Setiap argumen tentang "kemurnian Islam" mengandung, di dalam dirinya, sebuah klaim implisit tentang siapa yang berhak mengelola sumber daya, menetapkan norma, dan memimpin komunitas.

II DUA KELOMPOK

Anatomi Dua Kelompok Sosial: Ulama dan Adat

Kaum Ulama Padri memiliki basis legitimasi dari ilmu syariat & teks wahyu; sumber otoritas dari pendidikan Mekkah; institusi melalui surau dan majelis ta'lim; orientasi patriarkal; dan strategi kekuasaan melalui dakwah, paksaan, lalu koalisi militer. Mereka adalah pendatang baru dalam peta kekuasaan — membawa kapital kultural yang belum ada sebelumnya dan bersaing masuk ke dalam struktur yang sudah dikuasai oleh para penghulu adat.

Kaum Adat yang diwakili para penghulu adalah kelas yang sedang mempertahankan *status quo*. Mereka mengelola sistem matrilineal yang selain menjadi identitas budaya, juga merupakan sistem akumulasi dan distribusi kapital ekonomi: harta pusaka tinggi (tanah, sawah, kebun) diwariskan melalui garis ibu dan dikelola oleh penghulu suku. Ancaman Padri terhadap sistem ini bukan hanya ancaman terhadap keyakinan — ia adalah ancaman terhadap fondasi ekonomi-politik kelompok penghulu.

> *"Konflik antara Ulama dan Adat di Minangkabau tidak dapat dipahami tanpa memahami bahwa sistem matrilineal bukan hanya cara organisasi keluarga — ia adalah sistem properti, sistem*

distribusi kekuasaan, dan sistem produksi identitas sosial sekaligus."

— Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy (1983)

III MOTIF

Motif Konflik: Lapis demi Lapis

Lapis Pertama — Motif Moral-Perilaku: Judi, sabung ayam, minuman keras, dan berbagai praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat. Ini adalah "wajah publik" dari konflik — yang mudah dipahami, mudah dikhotbahkan, dan mudah dijual kepada massa.

Lapis Kedua — Motif Epistemologis: Pertarungan tentang sumber pengetahuan mana yang sah? Al-Qur'an dan Sunnah yang ditafsirkan secara literal, ataukah tradisi leluhur yang terakumulasi dalam *'urf*? Ini adalah pertikaian tentang siapa yang berhak berbicara atas nama kebenaran.

Lapis Ketiga — Motif Ekonomi-Struktural: Perebutan atas sumber daya material (tanah ulayat, harta pusaka, jalur perdagangan) dan sumber daya simbolik (legitimasi memimpin, otoritas hukum). Inilah pertarungan kelas dalam jubah agama.

Lapis Keempat — Motif Identitas dan Kehormatan: Bagi para penghulu, menerima tuntutan Padri berarti kehilangan kehormatan — sesuatu yang dalam kebudayaan Minangkabau diekspresikan melalui konsep *malu* (rasa malu sosial) yang sangat fundamental.

IV KAPITALISASI

Kapitalisasi Kekuasaan: Bagaimana Kedua Kelompok Bermain

Kaum Padri memulai dengan kapital kultural-religius yang relatif baru. Strategi kapitalisasi mereka berjalan dalam beberapa tahap: (1) melalui dakwah, mengkonversi kapital kultural menjadi kapital sosial; (2) dengan jaringan yang sudah cukup besar, mengkonversi kapital sosial menjadi kapital politik-militer; (3) krisis dengan masuknya Belanda yang mendisrupsi seluruh kalkulasi; dan (4) rekonstruksi kapital melalui aliansi baru dengan Kaum Adat pada 1833.

Pilihan Kaum Adat mengundang Belanda pada 1821 adalah konversi yang sangat berbahaya: menukar kedaulatan politik jangka panjang demi perlindungan militer jangka pendek. Sekali Belanda masuk, mereka tidak akan keluar tanpa meninggalkan bekas yang permanen.

Hasil akhir adalah sebuah struktur ketimpangan baru yang lebih kompleks: di puncak administrasi kolonial Belanda, di bawahnya penghulu adat yang telah ditundukkan, kemudian ulama yang tersisihkan, dan di dasar kelas petani dan pekerja yang kondisinya justru memburuk dengan masuknya

ekonomi kolonial.

SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK PERANG PADRI

VOL. III

Perebutan Tafsir Identitas dalam Medan Sosiologis

Tradisi & Adat versus Keyakinan Beragama: Suatu Analisa Trigger Motif Peristiwa — Clausa menuju Causa Subjek Politik Primordial

I PENGANTAR

"Siapa Kita?" — Pertanyaan yang Tidak Pernah Selesai

Di balik seluruh kekacauan militer Perang Padri, di bawah retorika teologis dan pertikaian adat, berdenyut sebuah pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan jauh lebih berbahaya: *siapa kita?* Di Minangkabau abad ke-19, pertanyaan tersebut memiliki dua jawaban yang saling meniadakan. Jawaban pertama: *kita adalah cucu dari leluhur, terikat dalam garis darah ibu.* Jawaban kedua: *kita adalah hamba Allah, terikat dalam syariat, diidentifikasi oleh kesalehan.*

TESIS PEMBUKA

Perang Padri adalah perang tafsir sebelum ia menjadi perang senjata. Yang diperebutkan bukan hanya wilayah atau kekuasaan formal, tetapi hak untuk mendefinisikan identitas kolektif — dan melaluinya, hak untuk menentukan siapa yang memimpin dan siapa yang mengikuti.

Ini adalah konflik yang dalam terminologi Clifford Geertz disebut sebagai benturan antara dua bentuk loyalitas primordial: loyalitas kepada ikatan darah-genealogi-tradisi di satu sisi, dan loyalitas kepada ikatan iman-teks-komunitas transenden di sisi lain.

II IDENTITAS

Identitas Bukan Kodrat — Ia Adalah Arena

Pendekatan primordialis klasik memandang identitas etnis dan keagamaan sebagai sesuatu yang "diberikan" (*given*). Namun pendekatan konstruktivis — Benedict Anderson, Fredrik Barth — menawarkan pembacaan yang lebih subversif: identitas adalah konstruksi yang terus-menerus dibangun, dinegosiasikan, dan dikontestasikan.

Ketika Kaum Padri datang, mereka tidak hanya membawa ajaran baru — mereka mengganggu *doxa* yang ada: asumsi-asumsi yang begitu tertancap dalam kehidupan sosial sehingga tidak lagi dipertanyakan. Dan gangguan terhadap *doxa*, dalam analisis Bourdieu, selalu menghasilkan resistensi yang intens karena yang dipertanyakan bukan hanya aturan permainan, tetapi legitimasi permainan itu sendiri.

III CLAUSA – CAUSA

Dari Clausa menuju Causa: Anatomi Pemicu Konflik

Dalam filsafat hukum dan sejarah, perbedaan antara *clausa* dan *causa* adalah perbedaan antara dalih dan sebab sejati. Rantai dari clausa menuju causa dapat dipetakan dalam empat lapis:

Clausa (Permukaan): Trigger moral-perilaku — judi, sabung ayam, minuman keras. Inilah wajah publik konflik yang mudah dijual kepada massa.

Motif (Tengah): Pertikaian epistemologis — sumber pengetahuan mana yang sah untuk menetapkan norma? Pertarungan tentang siapa yang berhak berbicara atas nama kebenaran.

Causa (Struktural): Perebutan kapital dan hegemoni kelas — sumber daya material dan simbolik. Inilah pertarungan kelas dalam jubah agama.

Subjek Politik (Produk Akhir): Primordialisme sebagai mobilisasi kolektif. "Kaum Padri" versus "Kaum Adat" sebagai subjek-subjek kolektif yang saling berhadapan.

> *"Setiap revolusi dalam sejarah menampilkan dirinya sebagai gerakan moral sebelum ia mengakui dirinya sebagai gerakan kepentingan. Ini bukan kemunafikan semata — ia adalah kondisi niscaya dari keberhasilan mobilisasi massa."*
>
> — Tafsir atas Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks (1971)

IV PRIMORDIALISME

Primordialisme sebagai Subjek Politik

Clifford Geertz mendefinisikan primordialisme sebagai loyalitas yang bersumber dari "ikatan-ikatan yang diberikan" (*given ties*) — darah, ras, bahasa, wilayah, agama, dan adat-istiadat. Kaum Padri menginstrumentalisasi ikatan iman; Kaum Adat melakukan hal yang analog dengan ikatan genealogis dan adat. Hasil dari instrumentalisasi timbal-balik ini adalah polarisasi identitas yang semakin dalam.

□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

Al-Baqarah: 256 — "Tidak ada paksaan dalam agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat"

Ironi yang mencolok: ayat yang paling kuat menegaskan kebebasan beragama dalam Al-Qur'an justru diabaikan oleh gerakan yang mengklaim memperjuangkan Islam yang murni. Ini mengungkap bahwa yang bekerja bukan hanya keyakinan teologis, melainkan logika kekuasaan yang menggunakan teologi sebagai bahasa.

V TIGA TIPOLOGI

Tiga Tipologi Tafsir Identitas

Tipologi Pertama — Askriptif-Genealogis: Identitas adalah sesuatu yang *diberikan* oleh kelahiran dan tidak dapat diubah. Anda adalah apa yang ditentukan oleh garis keturunan Anda. Kaum Adat menegaskan bahwa menjadi orang Minangkabau yang baik berarti menghormati warisan matrilineal.

Tipologi Kedua — Normatif-Skriptural: Identitas ditentukan oleh *kepatuhan pada norma yang diwahyukan*. Kaum Padri menegaskan bahwa menjadi Muslim yang sejati melampaui dan seharusnya menggantikan identitas genealogis.

Tipologi Ketiga — Sintesis-Dialektis: Identitas adalah produk dari *negosiasi yang terus-menerus* antara warisan dan aspirasi. Tipologi ini mengkristal dalam rumusan ABS-SBK. Imam Bonjol, pada tahap tertentu, adalah praktisi tidak-sadar dari tipologi ketiga ini.

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

Al-Hujurat: 13 — "...dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal"

SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK PERANG PADRI

VOL. IV

Bias Sosiologis

Sebuah Catatan Pinggir Historiografi: Audit Sumber, Angka 139, Petisi Pahlawan, dan Plakat Panjang

I METODOLOGI

Historiografi sebagai Praktik Produksi

Sejarah tidak ditemukan — ia diproduksi. Antara peristiwa yang terjadi dan teks yang kita baca tentang peristiwa itu, terdapat jarak yang diisi oleh pilihan, kepentingan, dan kondisi sosial penulisnya. Hayden White menunjukkan bahwa narasi sejarah selalu mengikuti struktur plot tertentu yang tidak inheren dalam peristiwanya sendiri, melainkan dipilih oleh sejarawan. Michel-Rolph Trouillot berbicara tentang "keheningan" dalam sejarah: apa yang tidak diceritakan, siapa yang tidak tercatat.

PROPOSISI METODOLOGIS DASAR

Sumber historiografis yang paling berharga bukan yang paling "objektif" — melainkan yang biasnya paling transparan. Sebuah teks yang kita ketahui siapa penulisnya, dalam konteks apa ia ditulis, dan dengan tujuan apa — lebih dapat diandalkan secara epistemologis daripada teks yang mengklaim netralitas tanpa mengungkap posisinya.

II BIAS KONTEKSTUAL

Periodisasi Historiografi dan Bias Konteks Politik

Era Reformasi membuka ruang diskursif yang selama Orde Baru ditutup rapat. Namun pembukaan ruang ini juga menciptakan kondisi untuk sesuatu yang berbeda: mobilisasi narasi kekerasan masa lalu untuk kepentingan politik kontemporer yang tidak selalu transparan tentang agendanya. Setiap periode mengandung biasnya sendiri: kolonial (melegitimasi intervensi), nasional awal (heroisme antikolonial), Orde Baru (persatuan nasional), Reformasi (narasi kekerasan meledak namun bias baru muncul).

III ANGKA 139

Angka 139: Forensik Sosiologis atas Klaim Numerik

Sumber Wikipedia mencatat: "disebutkan ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh" — peristiwa 11 Januari 1833. Tiga observasi sosiologis:

Pertama, asimetri presisi: Angka 139 sangat spesifik — ciri khas catatan birokrasi militer Belanda yang terorganisasi. Catatan administrasi kolonial memiliki kepentingan untuk menghitung korban dari pihaknya dengan presisi (untuk kompensasi, untuk justifikasi eskalasi).

Kedua, ketidakpresisian yang asimetris: "Ratusan tentara pribumi" direkam secara kabur. Ini adalah pola dalam sejarah kolonial yang berulang: korban dari "ras yang sama dengan penjajah" dihitung dengan cermat; korban dari masyarakat jajahan dicatat dengan samar.

Ketiga, keheningan tentang korban sipil: Di mana angka korban sipil Minangkabau dalam keseluruhan konflik? Nihil dalam pencatatan yang sama. Keheningan ini adalah bias yang lebih serius dari kesalahan faktual manapun.

IV PLAKAT PANJANG

Plakat Panjang: Anatomi Kebohongan Institusional

Plakat Panjang 1833 menyatakan bahwa "kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud untuk menguasai negeri tersebut." Pada 1833, Belanda sudah hadir secara militer selama 12 tahun. Pernyataan ini bukan deskripsi fakta — ia adalah konstruksi legitimasi yang bekerja secara retroaktif.

"Penduduk akan tetap diperintah oleh penghulu mereka" benar secara formal dan menyesatkan secara substansial. Penghulu dipertahankan tetapi dijadikan alat administrasi kolonial. Ini adalah strategi klasik *indirect rule*. "Tidak pula diharuskan membayar pajak" — langsung dibatalkan oleh kalimat berikutnya: "penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda." Tanam paksa kopi adalah pajak dalam bentuk lain.

> *"Sebuah kekuasaan yang sungguh-sungguh berdaulat tidak perlu menjelaskan dirinya seperti ini. Semakin formal dan semakin murah hati sebuah janji tertulis, semakin besar kemungkinan ia adalah instrumen manipulasi."*
>
> — Tafsir penulis

SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK PERANG PADRI

VOL. V

Konsolidasi Filosofis Adat dan Ulama

Falsafah Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah: Konflik Padri dan Kesepakatan Awal Abad ke-19

□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

"Adat adalah hakim; syariat adalah penyempurna" — kaidah sintesis

I PENGANTAR

Falsafah yang Lahir dari Luka

Tidak ada sintesis peradaban yang lahir dari meja diskusi yang tenang. Demikianlah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* lahir. Bukan sebagai kemenangan Kaum Padri yang berhasil mengislamisasi adat secara total. Bukan pula sebagai kemenangan Kaum Adat yang berhasil mempertahankan tradisinya utuh tanpa perubahan. Ia lahir sebagai rekognisi mutual: bahwa keduanya membutuhkan yang lain untuk tetap hidup, relevan, dan bermakna.

FORMULA KONSOLIDASI

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru

Adat bersendikan syariat; syariat bersendikan Kitabullah; syariat berkata, adat memakai; alam terkembang menjadi guru. — Empat lapis yang membentuk satu kosmologi.

II PRASYARAT

Tiga Prasyarat yang Membuat Konsolidasi Menjadi Mungkin

Pertama — Kelelahan yang Produktif: Tiga dekade perang menghasilkan kondisi *conflict exhaustion* yang produktif: kelelahan yang membuka mata bahwa tujuan semula tidak dapat dicapai melalui konflik yang berkepanjangan. Pertanyaan berubah dari "bagaimana kami mengalahkan mereka" menjadi "apa yang kami dan mereka sama-sama tidak bisa kehilangan."

Kedua — Musuh Bersama: Kehadiran Belanda yang semakin mengancam memberikan Kaum Padri dan Kaum Adat sebuah cermin di mana mereka untuk pertama kalinya dapat melihat diri mereka sebagai bagian dari satu tubuh sosial yang sama: masyarakat Minangkabau yang sedang dijajah.

Ketiga — Ketersediaan Bahasa Sintesis: Baik dalam tradisi fiqh Islam maupun dalam tradisi adat Minangkabau, sudah tersedia bahasa dan konsep yang memungkinkan sintesis. Tradisi fiqh mengenal *'urf*, *maslahah*, dan *maqashid*. Tradisi adat mengenal formula *"alam takambang jadi guru"* yang secara kosmologis terbuka terhadap otoritas sumber pengetahuan yang lebih tinggi.

III ANATOMI ABS-SBK

Anatomi ABS-SBK: Empat Lapis Kosmologi

Lapis Satu — Adat Basandi Syarak: Adat berdiri di atas fondasi syariat sebagai landasan normatifnya. *Basandi* (bersendi) adalah hubungan antara bangunan dan fondasinya: bangunan yang kokoh membutuhkan fondasi yang kuat, tetapi fondasi ada untuk menopang bangunan, bukan menggantikannya.

Lapis Dua — Syarak Basandi Kitabullah: Syariat sendiri bersendi pada Al-Qur'an sebagai sumber tertinggi. Syariat adalah *interpretasi* manusiawi atas wahyu, bukan identik dengannya. Ini membuka ruang ijtihad yang menjadi nafas dinamisme formula ini.

Lapis Tiga — Syarak Mangato Adat Mamakai: Syariat *berkata*; adat *memakai*. Pembagian peran yang sangat canggih: syariat menetapkan prinsip universal; adat menerjemahkannya ke dalam praktik lokal yang kontekstual.

Lapis Empat — Alam Takambang Jadi Guru: Alam semesta yang terbentang menjadi guru. Realitas alam sendiri adalah sumber pengetahuan yang sah. Lapisan ini yang mencegah ABS-SBK menjadi sistem tertutup.

> *"Formula ABS-SBK bukan kompromi antara dua sistem yang saling melemahkan. Ia adalah konstruksi hierarki normatif yang menempatkan setiap elemen pada posisinya yang tepat — bukan sebagai rival, melainkan sebagai lapisan dalam satu arsitektur yang saling menopang."*
>
> — A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru (1984)

IV TRANSLASI EPISTEMIK

Translasi Epistemik: ABS-SBK dalam Bahasa Akademik Modern

TRANSLASI EPISTEMIK YANG DIAJUKAN

"Ilmu bersendi kepada metode; metode bersendi kepada fundamen dasar sebagai ide referensif."

Ini bukan sekadar padanan struktural dari ABS-SBK. Ini adalah pernyataan bahwa peradaban Islam di Minangkabau telah, jauh sebelum epistemologi ilmu modern merumuskannya, membangun sistem normatif yang mengandung insight yang sama: bahwa tidak ada ilmu yang berdiri sendiri tanpa metode, dan tidak ada metode yang bermakna tanpa fundamen yang memberinya orientasi. Ini adalah ijtihad epistemologis.

Perbedaan yang krusial antara ABS-SBK dan epistemologi ilmu modern bukan pada strukturnya, melainkan pada sifat fundamennya. Dalam ABS-SBK, fundamen (*Kitabullah*) adalah transenden dan tidak dapat difalsa-fikasikan dari dalam sistem. Dalam epistemologi ilmu modern (Popper, Kuhn), fundamen adalah *paradigma* yang pada prinsipnya dapat digugat melalui akumulasi anomali. Ini adalah perbedaan yang produktif, karena menentukan di mana masing-masing sistem memiliki kekuatan dan batas.

SERI KAJIAN SOSIOLOGI KONFLIK PERANG PADRI

VOL. VI

Pasca Perang Padri — Sintesa Inferentif & Konklusi

Arah Ketegangan dan Pergerakan Sosio-Politik Masyarakat Sumatera Barat dalam Norma Fundamental dan Supremasi Sosial

□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□

Al-Hasyr: 2 — "Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan"

I PEMBUKA

Membaca Akhir sebagai Permulaan

Sebuah konklusi yang jujur tidak menutup — ia membuka. Ia mengumpulkan seluruh benang yang telah direntangkan dalam kajian sebelumnya dan menunjukkan bahwa di balik keseluruhannya, terdapat sebuah pertanyaan yang lebih besar dari semua yang telah dijawab: *ke mana sesungguhnya pergerakan itu menuju?*

Sumatera Barat pasca-Perang Padri adalah komunitas yang terus bergerak dalam ketegangan yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Norma fundamental yang diperebutkan di abad ke-19 masih diperebutkan — dengan bahasa yang berbeda, aktor yang berbeda, tetapi dengan struktur ketegangan yang secara mengejutkan konsisten.

PROPOSISI PEMBUKA

Pasca-Perang Padri bukan sebuah akhir yang tertutup. Ia adalah sebuah konfigurasi baru dari ketegangan yang sama — antara fundamen universal dan ekspresi lokal, antara norma transenden dan supremasi sosial yang lahir dari sejarah. ABS-SBK adalah bukan penyelesaian dari ketegangan itu; ia adalah cara untuk hidup di dalam ketegangan itu secara bermartabat.

II SINTESA INFERENTIF

Enam Proposisi yang Ditarik dari Keseluruhan Seri

I — Ontologis — Konflik adalah Mekanisme Produksi Nilai

Perang Padri tidak menghancurkan nilai-nilai Minangkabau — ia memaksa nilai-nilai itu untuk diartikulasikan secara eksplisit untuk pertama kalinya. ABS-SBK adalah bukti: konflik yang cukup intensif menghasilkan sintesis yang lebih kaya dari setiap posisi yang bertentangan.

II — Sosiologis — Ketimpangan yang Tidak Dikelola Selalu Mengundang Pihak Ketiga

Keputusan Kaum Adat mengundang Belanda pada 1821 adalah pola yang berulang dalam sejarah: konflik internal yang melampaui kapasitas resolusi internal selalu membuka pintu bagi kekuatan eksternal yang kepentingannya berbeda.

III — Epistemologis — Supremasi Normatif Selalu Diperebutkan, Tidak Pernah Diberikan

Tidak ada sistem norma yang menduduki puncak hierarki sosial secara "alami". ABS-SBK adalah hasil dari perjuangan yang panjang — ia bukan kebenaran yang ditemukan, melainkan kesepakatan yang diperjuangkan.

IV — Filosofis — Fundamen yang Kokoh Membutuhkan Fleksibilitas pada Lapisan Atasnya

ABS-SBK mengajarkan bahwa keteguhan pada fundamen dan fleksibilitas pada ekspresi adalah bukan kontradiksi melainkan kondisi bagi keduanya untuk berfungsi.

V — Historis — Identitas Kolektif Paling Kuat Lahir dari Ancaman, Bukan Kemakmuran

Identitas "orang Minangkabau yang Muslim" yang kita kenal hari ini terbentuk di bawah tekanan triple: perang saudara, kolonialisme, dan kebutuhan rekonsiliasi.

VI — Prospektif — Sintesis yang Hidup Membutuhkan Generasi yang Terus Menegosiasikannya

ABS-SBK bukan artefak museum. Generasi Minangkabau kontemporer yang tidak tahu mengapa ABS-SBK ada tidak dapat menggunakannya sebagai panduan nyata — ia hanya mengulangnya sebagai slogan.

III SUPREMASI SOSIAL

Supremasi Sosial: Siapa yang Memegang Norma, Memegang Dunia

Konsep "supremasi sosial" merujuk pada kapasitas untuk mendefinisikan norma yang mengatur kehidupan bersama — bentuk kekuasaan yang paling tahan lama karena tidak beroperasi melalui paksaan, melainkan melalui internalisasi. Gramsci menyebutnya *hegemoni*.

Supremasi Pertama — Hegemoni Normatif-Keagamaan (pasca-1838): Dengan kristalisasi ABS-SBK, Islam menduduki posisi referensif tertinggi dalam hierarki norma Minangkabau. Namun supremasi ini selalu diimbangi oleh penghulu adat melalui mekanisme *Tali Tigo Sapilin*.

Supremasi Kedua — Hegemoni Kolonial-Administratif (1838–1945): Belanda mengintegrasikan kedua bentuk otoritas lokal ke dalam aparatus administrasi kolonial. Supremasi yang sebelumnya bersumber dari dalam masyarakat kini bersumber dari pengakuan oleh kekuasaan asing.

Supremasi Ketiga — Hegemoni Nasionalis-Modernist (1945–kini): Kontribusi intelektual Minangkabau yang luar biasa besar dalam pembentukan Indonesia modern — Hatta, Sjahrir, Hamka, Agus Salim, Natsir — adalah bukti bahwa masyarakat yang telah melalui Perang Padri memiliki kapasitas sintesis yang khas antara tradisi dan modernitas.

IV KONKLUSI

Tiga Pilar Konklusi dan Penutup Seri

Pilar I — Konflik adalah Cara Peradaban Belajar tentang Dirinya: Tanpa konflik Padri-Adat, ABS-SBK tidak akan pernah perlu diartikulasikan — karena tidak ada yang mempertanyakan apa yang sudah "begitu adanya."

Pilar II — Sintesis yang Hidup adalah Lebih Berharga dari Kemenangan yang Mati: Tidak ada pemenang dalam Perang Padri dalam artian konvensional. Namun yang lahir dari ketidak-adaan pemenang itu — ABS-SBK, tradisi intelektual Minangkabau, kontribusi besar bagi Indonesia modern — jauh lebih berharga.

Pilar III — Norma Fundamental adalah Pertaruhan Peradaban, Bukan Hanya Agama: Yang diperebutkan dalam Perang Padri bukan hanya soal apakah judi dan sabung ayam boleh atau tidak. Yang diperebutkan adalah siapa yang berhak mendefinisikan "benar" — dan dengan itu, siapa yang memegang kunci supremasi sosial.

KONKLUSI INFERENSIAL AKHIR

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah — Ilmu Bersendi Metode, Metode Bersendi Fundamen — adalah satu gerakan filosofis yang sama dalam dua bahasa yang berbeda: pernyataan bahwa tidak ada pengetahuan yang bermakna tanpa hierarki, tidak ada hierarki yang adil tanpa fundamen yang melampaui kepentingan siapapun, dan tidak ada fundamen yang hidup tanpa komunitas yang terus-menerus memperbarui pemahamannya atas apa yang sesungguhnya ia percayai.

[illegible]

Al-Ra'd: 11 — "Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

CATATAN POETIK PENUTUP · SERI PERANG PADRI

Padri yang Kemarin

Sudahkah Membaca Siapa

Padri yang kemarin sudahkah
membaca siapa yang menulis nasib dan takdir
Ya?
    "Itu pedang di atas Padang dan perang?!"

Terkadang, kita lupa bahwa hanya mata dajjal
yang memotong peristiwa dan menyebut sebagian adalah
kisah yang utuh dan seluruh —

simbolisasi akhir zaman dalam manipulasi subjektif
dan fokus yang tak lagi menoleh ke kiri atau ke kanan :
    dalam verifikasi dualisme nalar mata manusia

"Lihatlah" — Na□har —
    akibat dari orang sebelum kamu :

□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

Al-Rum: 42 · "Berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah"

bagaimana bangsa Rum menjadi suatu pelajaran —
keruntuhan sistem sosial di atas kekuasaan politik

diferensi atau perbedaan yang menjadi Plakat Panjang
dalam dikotomi dan sekularisasi
    dari sekularisme ideologi
    dan dampak sosiologis.

— Ahmad Wansa Al-faiz

REFERENSI KUMULATIF SERI

1. Al-Ghazali. Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
2. Al-Syathibi, Ibrahim ibn Musa. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
3. Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1983.
4. Azra, Azyumardi. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII. Bandung: Mizan, 2004.
5. Barth, Fredrik (ed.). Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget, 1969.
6. Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press, 1990.
7. Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
8. Coser, Lewis A. The Functions of Social Conflict. New York: Free Press, 1956.
9. Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-1847. London: Curzon, 1983.
10. Djaja, Tamar. Riwajat Hidup Tuanku Imam Bonjol. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
11. Geertz, Clifford. "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States." In Old Societies and New States. New York: Free Press, 1963.
12. Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. New York: International Publishers, 1971.
13. Hadler, Jeffrey. Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism. Ithaca: Cornell University Press, 2008.
14. Hamka. Ayahku: Riwajat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah. Jakarta: Djajamurni, 1958.
15. Kahin, Audrey. Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
16. Kato, Tsuyoshi. Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1982.
17. Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
18. Navis, A.A. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
19. Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
20. Ricoeur, Paul. Oneself as Another. Trans. Kathleen Blamey. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
21. Ricoeur, Paul. Hermeneutics and the Human Sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
22. Simmel, Georg. Conflict and the Web of Group Affiliations. Trans. Kurt Wolff. New York: Free Press, 1955.
23. Stoler, Ann Laura. Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense. Princeton: Princeton University Press, 2009.
24. Trouillot, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995.
25. Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.
26. White, Hayden. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973.